

**KONSEP ETIKA POLITIK AL MAWARDI DAN
PENERAPANNYA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI
(2019-SEKARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial S.1**

Oleh:

SARIFUDDIN

NIM: 0404162012

PROGRAM STUDI: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY ISLAM

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "KONSEP ETIKA POLITIK AL MAWARDI DAN PENERAPANNYA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI (2019-SEKARANG)" an. SARIFUDDIN, NIM 0404162012, Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 13 November 2020.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 13 November 2020


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
PROGRAM SARJANA (S-1) FAK.
USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UIN
SUMATERA UTARA MEDAN

Ketua


(Drs. Muhammad Aswin, M.AP)

NIP. 196808172003121003

Sekretaris


(Siti Ismahani, S.Ag.M.Hum)

NIP. 196905031999032003

Anggota Penguji


(Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag)

NIP. 196507051993031003


(Dr. Elly Warnisyah H. M.Ag)

NIP. 196703202007012026


(Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag)

NIP. 196901111991031004


(Drs. Abu Sahrin, M.Ag)

NIP. 196710272000031002

Mengetahui:

Dekan Fak. Ushuluddin Dn Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan


(Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag)

NIP. 196507051993031003

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

KONSEP ETIKA POLITIK AL MAWARDI DAN PENERAPANNYA PADA MASA
PEMERINTAHAN JOKOWI (2019-SEKARANG)

Oleh:

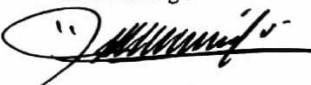
SARIFUDDIN

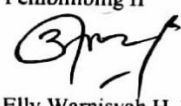
NIM: 0404162012

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.SOS) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Medan, Oktober 2020

Rec 2/10 2020
Pembimbing I

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 196507051993031003

rec 2/10 2020
Pembimbing II

Dr. Elly Warnisyah H. M. Ag
NIP. 196703202007012026

PENGESAHAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II Yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : SARIFUDDIN

NIM : 0404162012

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan Penerapannya Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)

Berpendapat Bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang telah berlaku dan selanjutnya dapat di Munaqasahkan

Medan, Oktober 2020

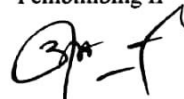
Pembimbing I



Prof. Dr. Katimin, M.Ag

NIP. 196507051993031003

Pembimbing II



Dr. Elly Warnisyah H. M.Ag

NIP. 196703202007012026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sarifuddin
NIM : 0404162012
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Tiram, 03 Juni 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara

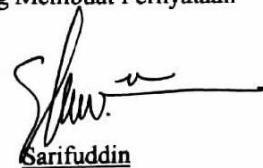
Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**“Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan Penerapannya Pada Masa Pemerintahan
Jokowi (2019-Sekarang)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan
yang telah disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan
dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2020

Yang Membuat Pernyataan


Sarifuddin



Nama : Sarifuddin
NIM : 0404162012
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan
Penerapannya Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, etika politik seakan sudah tidak berlaku dan memudar, bahkan cenderung menghilang. Dalam kenyataannya politik sebagai ajang pertarungan kekuatan dan kepentingan, hingga melakukan segala cara untuk menghalalkan demi tercapainya sebuah tujuan. Sikap para elit politik sudah merusak etika berpolitik para politikus, salah satunya adalah praktik money politik kerap kali terjadi di Indonesia yang sama sekali tidak mencerminkan sikap sebagai seorang yang mempunyai keyakinan dalam beragama khususnya agama Islam yang mengharamkan proses kegiatan yang tidak beretika tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik mengupas pemikiran Al Mawardi dengan membuat sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul ***Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan Penerapannya Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)***. Al Mawardi adalah seorang tokoh Muslim yang membahas tentang etika politik secara mendalam agar bisa mengurai permasalahan politik umat saat ini

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, menjelaskan dan menganalisis hasil dari pemikiran Al Mawardi tentang etika politik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep etika politik menurut Al Mawardi, untuk mengetahui juga landasan pemahaman etika politik Al Mawardi dan penerapannya pada masa pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data (*Content Analysis*). Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan politik.

Kata Kunci: Etika, Politik, Etika Politik, Al Mawardi

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah Swt tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa memberikan segala rahmat dan karunianya, hingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan Penerapan Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)*" dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan tidak lupa pula Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan buat kita semua, terkhusus buat peneliti, semoga nantinya kita senantiasa mendapat pertolongan di Yaumul Ma'sar kelak, Amin Yarobbal Alamin.

Penulisan Skripsi ini dilakukan secara sistematis, agar memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial, Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mungkin dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- I. Pertama saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- II. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Mawarni yang selalu memberikan Doa dan Nasehat yang tidak putus-putus diberikan kepada penulis dan seluruh keluarga penulis.
- III. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- IV. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara
- V. Bapak Drs. Muhammad Aswin, M. Ap selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Bapak Muhammad Hidayat, M.A selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Study Islam yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.
- VI. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi 1 saya.
- VII. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Elly Warnisyah H. M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi II saya.
- VIII. Buat kawan-kawan yang telah menemani dan memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini dan sahabat-sahabat seperjuangan Ahmad Fahrozi, Juandi Sitorus, Irhamdi Ahmad Munthe, Ikke Purnama Sari, Rizka Hardianti, Vivi Andri Syafira, Anita Zam'arini, Salman Pohan, Suhendra, Indra Kelana, Azhari Kusworo, Widya Utami, Delfianti, Nurbaiti dan seluruh rekan-rekan

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Stambuk 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu

- IX. Rekan-rekan yang sering memberikan dukungan penuh kepada penulis baik berupa semangat maupun motivasi dan support nya Yayang Gustiawan Koto, Rian Ramadhan, Al Ma'adi, Aldi, Darbi, Anisa Kasturi, Asmidar Lina.

Penulis berharap semoga skripsi dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan untuk semuanya.

Medan, Oktober 2020

Penulis.

Sarifuddin
0404162012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Istilah	11
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Kajian Terdahulu.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Etika Politik.....	19
B. Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer.....	24
C. Sejarah Etika Politik.....	30
D. Etika Politik Menurut Para Ahli.....	32
BAB III BIOGRAFI AL MAWARDI DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA	35
A. Riwayat Hidup Al Mawardi	35
B. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al Mawardi.....	37
C. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Al Mawardi	40
D. Karya-Karya Al Mawardi.....	44
E. Pemikiran Politik Al Mawardi	46

1. Teori Kontrak Sosial	49
2. Imamah.....	50
3. Tentang Wazir.....	52
BAB IV PENERAPAN ETIKA POLITIK AL MAWARDI PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI (2019-SEKARANG)	54
A. Etika Politik Al Mawardi	54
B. Etika Politik Al Mawardi Pada Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)	55
C. Penerapan Etika Politik Di Indonesia	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN-SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa dan negara memiliki norma etis dan atau moral dalam menyelenggarakan kegiatan dalam beraktivitas. Bangunan etika sebagai bentuk pondasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yang harus dikembangkan adalah berdasar falsafah Indonesia, karena dalam kehidupan berbangsa, baik dari segi budaya, politik maupun dalam dunia pemerintahan serta dalam menegakkan keadilan Pancasila menjadi pedoman atau pondasi nya.¹

Etika termasuk bagian dari filsafat, yang pada dasarnya merupakan akar dari seluruh penggambaran norma, baik norma hukum, norma moral serta aturan kenegaraan lainnya. Etika adalah sifat yang paling mendasar dan menyeluruh bagi manusia, baik dalam bersosial, bernegara maupun berbangsa. Oknum politik di bangsa ini maupun dikalangan intelektual begitu mudah kita jumpai orang-orang yang pintar dan memiliki wawasan luas, namun sebagian dari mereka telah memudar akan watak kesusilaannya.

Dalam dunia perpolitikan, etika yang baik sangatlah diperlukan. Untuk menjalankan suatu alur politik etika yang sesuai sangatlah penting, karena dari suatu

¹ Eko Handoyo DKK, *Etika Politik*, (Semarang: Widya Karya Press 2016), hlm. 227

proses untuk menjalankan suatu tugas atau mandate, sesuai dengan norma dan aturan akan mendapatkan suatu hasil yang diinginkan secara maksimal dan tujuan yang telah disepakati bersama.

Karena dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersumber dari kerja lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuknya, yang mana etika baik juga berpengaruh terhadap kebijakan itu. Jadi hal-hal kecil dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan dalam dunia politik harus diperhatikan guna menuju suatu keadilan sebagai manusia yang telah diberikan kewenangan dan kekuasaan.

Pengkajian lebih dalam mengenai persoalan kehidupan dunia politik yang ada di Indonesia saat ini begitu kompleks. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah mengalami dan melewati persoalan masa yang begitu kelam di dalam dunia politik, diawali masa kemerdekaan yaitu masa orde lama hingga berlanjut ke masa orde baru sampai datangnya era reformasi tahun 1998 saat ini. Sistem politik di Indonesia kian berubah hingga masa transisi yang dahulunya sistem perpolitikan lebih mengarah ke otoritarian, namun sekarang sudah lebih beranjak ke arah yang kita kenal Demokrasi.²

Etika politik saling berhubungan dengan sikap, nilai, maupun moral yang pada hakikatnya dimiliki oleh manusia. Kemudian atas dasar tersebutlah yang memberikan kekuatan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. “Menurut Frans Magnus Suseno bahwa etika politik memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang

² Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), hlm. 49

ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.”

Merujuk pada hal di atas dalam bentuk realitasnya kehidupan dunia perpolitikan secara umum yang terjadi sekarang, justru banyak elit politik yang kurang menyadari atau bahkan telah sadar bahwa sikap atau etikanya dalam berpolitik begitu bertentangan dengan asas atau norma etika politik. Namun yang menjadi perhatian tersendiri adalah persaingan pesta demokrasi yang dimana para aktor yang berkecimpung dalam politik memiliki tujuan utama yaitu popularitas dan kekuasaan. Sikap para petinggi politik harus menunjukkan sikap yang baik, hingga dapat dicontoh oleh rakyat yang di pimpinnya.

Terutama dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan, pemerintah atau elit politik harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai etika sehingga menjunjung tinggi rasa persamaan dan keadilan menyeluruh yang dapat dirasakan rakyat yang sesuai dalam Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya rakyat berkeadilan serta makmur sebagaimana telah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.³

Pada saat ini, etika dalam politik tidak terlalu dipikirkan bahkan terjadi yang namanya degradasi etika. Pada kenyataannya, sikap dari politikus seakan-akan melakukan segala cara untuk mencapai yang diinginkan. Dalam hal ini, Nietzsche berpendapat makna etika di konstruksi dalam politik itu telah dihitungkan dari segi

³ Jubair Situmorang, *Etika Politik...*, hlm. 50

baik dan buruknya. Terlihat sikap politik yang dipertontonkan sekarang tidak lain sebagai ajang dalam kekuatan dan ingin meraih kekuasaan.

Sikap para petinggi politik harus sesuai berdasarkan tuntunan UUD 1945 yaitu memberikan edukasi terhadap rakyat, sehingga rakyat tidak terjerumus ke dalam dunia politik dianggap selama ini buruk. Seharusnya petinggi politik sebagai acuan yang efektif untuk rakyat dipimpinya, yakni sikap dalam berpolitik harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa persamaan.

Dalam dunia politik, baik di kancah nasional ataupun di tingkat daerah, begitu maraknya kegiatan tidak beretika. Di dalam kehidupan elite politik terjadi memperebutkan kepentingan antarpribadi dan kelompok yang kuat sehingga tidak lagi dapat membedakan siapa kawan dan lawan termasuk saudaranya sendiri. Keadaan ini diperparah oleh kasus yang bermunculan akhir-akhir ini yang menjerat politikus elit kejeruji besi, hal ini menandakan kurang bermoralnya oknum politik. Begitu malangnya nasib bangsa ini akibat dari perilaku elit politik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kewibawaan.

Petinggi politik kebanyakan tidak lagi berpihak kepada rakyat, melainkan kebanyakan dari mereka lebih mementingkan untuk urusan pribadi dan kelompok yang pada prinsipnya merugikan masyarakat pada keseluruhan. Bangsa ini lagi mengalami krisis kejujuran, krisis akan kesadaran kolektif dalam melakukan sebuah aksi yang sifatnya destruktif hingga merugikan kepentingan bersama.

Di tangan sebagian elit politik, jabatan yang diemban menjelma menjadi sebagai sarana untuk berlomba-lomba pada jalan kejelekan (*fastabiqul sayyiah*) dan bukan

pada jalan kebaikan (*fastabiqul khairat*). Para petinggi politik seolah-olah lupa bahwa bangsa ini memiliki falsafah Negara, yakni Pancasila yang semua sila-silanya bersumber pada nilai-nilai agama. Hasilnya para elit politik atau para petinggi politik tidak terfikirkan lagi dalam mengimplementasikan nilai tersebut.⁴

Analisis mengenai pikiran dan etika politik dalam bahasan ini tidak semata-mata menjelaskan tentang persoalan sikap petinggi politik, namun melihat dari sisi sosial atau kemanusiaan dan kepentingan. Etika politik tidak memberikan penawaran suatu konsep aturan terhadap dasar negara. Etika politik disini tidak memberikan solusi untuk suatu permasalahan hanya saja memberikan aspek pikiran tentang menghadapi masalah kehidupan. Etika politik juga berperan sebagai alat mengkritisi ideologi (bukan hukum dan negara).

Beban Etika Politik tidak hanya menggabungkan politik praktis, melainkan menopang agar persoalan ideologis yang bisa dijalankan secara benar. Etika politik yang dibahas oleh Al Mawardi begitu sempurna dalam membangkitkan kehidupan berpolitik.⁵ Etika yang dijelaskan Al Mawardi begitu mengharuskan seorang kepala negara agar taat dan berpedoman kepada ajaran yang telah tercantum di dalam Al-qur'an dan Hadist. Maka sebab itu, Al Mawardi menuangkan pikirannya untuk memperbaiki keadaan rakyat dan menjaga keamanan dalam berpolitik.⁶

⁴ Abdul Salam Ahmad, Skripsi, *Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad sebagai acuan terhadap politik kontemporer*, 2015 hlm. 3-4

⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah 2007)

⁶Rashda Diana DKK, *jurnal etika politik dalam perspektif Al Mawardi* (<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsqafah>), hlm. 364-365

Pada dasarnya Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, tidak pernah terpisahkan oleh Islam, sumber dari inspirasi etika dan moral bangsa bernegara Islam lah yang menjadi landasannya. Adapun masalah yang dihadapi dalam perpolitikan bangsa Indonesia saat ini merupakan degradasi moral, begitu banyak kegiatan yang bisa kita lihat menyimpang dari ajaran agama yakni sogok-menyogok, korupsi dan hal buruk lainnya.

Di dalam Al Qur'an memerintahkan agar manusia menaati yang namanya *ulil amri* atau pemimpin diantara kamu, jadi secara garis besar Islam memberi gambaran sebuah konsep perpolitikan, namun ketaatan seperti apa yang diperintahkan Islam melainkan ketaatan kritis yang tolak ukur nya ialah Al Qur'an dan Hadist. Jadi diperkenankan untuk memberi saran atau kritikan agar tetap kejalan yang benar. Jika hal tersebut masih dilanggar, maka boleh untuk tidak dipatuhi. Hal diatas tertuang atau dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 59:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*⁷

7

Dalam keyakinan masyarakat Islam, Al Quran dan Hadist diyakini sebagai pedoman umat manusia yang mengajarkan segala seluk beluk kehidupan manusia dan segala aspek kehidupan, antara lain dalam hal politik. Oleh sebab itu, Islam selalu disebut dengan *way of life* untuk orang-orang yang menyakininya. Oleh karena itu bagi keyakinan dan ibadah umumnya Al Quran dan Hadist selalu tegas dalam kajian yang lebih akurat lagi. Dalam hal ini pandangan masyarakat dan politik tatanegaraan dikaji Al Quran secara umum dan bersifat umum atau garis besarnya saja.⁸

Pandangan politik ketatanegaraan, ketaatan adalah bagian yang utama dan sangatlah penting. Jika tidak ada ketaatan maka, corak pemerintahan tidakpun ada gunanya, hukum- hukum yang di keluarkan mengatur pemerintah juga tidak ada gunanya apabila masyarakat atau warga negara tidak menerapkan hukum-hukum atau aturan tersebut. Di dalam Al Qur'an memerintahkan agar manusia menaati yang

⁷ Q.S. An Nisaa/4: 59

⁸Katimin, *Politik Islam*, (Medan: Perdana Publisng, 2017), hlm. 1-5

namanya *ulil amri* atau pemimpin diantara kamu. Jadi secara garis besar Islam memberi gambaran sebuah konsep perpolitikan, namun ketaatan seperti apa yang diperintahkan Islam melainkan ketaatan kritis yang tolak ukurnya ialah Al Qur'an dan Hadist, jadi diperkenankan untuk memberi saran atau kritikan agar tetap kejalan yang benar. Jika hal tersebut masih dilanggar, maka boleh untuk tidak dipatuhi.

Agar manusia dapat menjalankan azas melalui dengan ketaatan terhadap Allah, serta utusannya, dan kepada anjurannya. Ketaatan kepada Allah diungkapkan dalam ketaatan terhadap hukum-hukum yaitu alquran. Ketaatan terhadap rasul diungkapkan sama halnya ketaatan kepada sunnah rasullah yaitu hadist, oleh karena itu ketaatan kepada anjurannya diungkapkan dengan ketaatan terhadap konstitusi atau hukum-hukum negara.

Di Indonesia Islam merupakan agama yang mayoritas. Hal ini dapat dijadikan sebuah tuntunan atau solusi untuk kehidupan yang baik dalam perpolitikan di negeri ini. Islam telah banyak memberi penjelasan tentang solusi atau petunjuk terhadap masalah hidup manusia di muka bumi, antara lain persoalan tentang agama dan kehidupan bersosial.

Bagi bangsa Indonesia, etika politik merupakan Pancasila. Etika politik yang berdasarkan pancasila merupakan etika politik yang berlandaskan pada ajaran atau norma ketuhanan, persatuan, kerakyatan, keadilan dan persamaan. Etika politik juga tidak terlepas dari pembukaan UUD 1945, di mana terdapat sumber tentang religius, filsafati, dan moral.

Secara pengetahuan dan empiris agama mengajarkan dikelompok elit politik dapat dikatakan belum ada kemajuan. Ini terlihat kurang optimalisasi nya ajaran dari sisi agama dijadikan dasar rujukan etika elit politik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, agama bisa dimengerti dan diterapkan dalam bentuk ritual semata, hingga belum ada yang namanya kesadaran dan pendalaman. Hal yang paling mendalam atau penting dari ajaran agama ialah hubungan manusia dengan tuhan nya (*Hablum Minaullah*) dan sesama manusia (*Hablum Minan Nas*). Dengan demikian, moral dan etika dari seorang elit politik yang seharusnya menjadi teladan dari sikap manusia yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memantau dan mengawasi setiap tingkah laku manusia yang berada di bumi.

Belajar dari kebiasaan klasik ada beberapa sikap yang dapat digunakan sebagai prinsip bagi etika dalam berpolitik yaitu manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya melakukan proses politik dalam memperjuangkan kepentingan umum dan mencari sebuah kebenaran untuk kebahagiaan, dalam memperoleh kepentingan bersama dalam berpolitik agar senantiasa berlandaskan pada tatanan moral yang sumber rujukannya merupakan nilai kemanusiaan dalam bentuk menyeluruh. Oleh sebab itu proses politik adalah kesadaran kodrat sebagai manusia agar berjuang bersama-sama. Hingga seperti ini, pemerintah tidaklah mempunyai jabatan yang mutlak, mereka hanya menjalankan tugasnya dan bersikap demokratis dalam bertindak.

Etika dikenal berpengaruh dalam persoalan manusia, etika memberikan manusia orientasi bagaimana mengikuti kehidupan melalui serangkaian tindakan sehari-harinya. Hal ini etika menolong manusia dalam memutuskan sikap hingga dapat bertindak secara benar. Etika juga membantu kita untuk mengambil keputusan yang benar tentang tindakan apa yang perlu dilakukan. Etika dapat diimplementasikan setiap sisi kehidupan termasuk dalam kegiatan dibidang politik, etika dasar memberikan ajaran tentang moralitas dimana menyangkut soal baik dan buruk. Tetapi etika tidak hanya mengajarkan tentang baik dan buruk, namun lebih bersifat membangun kesadaran setiap manusia.

Dasar-dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu:

Pertama, etika dari pemerintah yang diberikan amanat kepada para penguasa dan partai politik harus lebih mendahulukan sikap jujur, amanah, sportif, sikap melayani, berjiwa besar, rendah hati dll. Etika politik dan pemerintahan memiliki tujuan pemerintahan yang bersih dan bebas dari yang namanya korupsi, hingga dapat menumbuhkan sikap atau suasana yang demokratis dengan memiliki ciri keterbukaan, tanggung jawab dan dapat mendengarkan aspirasi rakyat.

Kedua, etika dari kehidupan berbangsa meliputi etika untuk menegakkan hukum yang bersikap adil, agar terciptanya rasa keadilan sosial ketenangan dan keteraturan. Etika politik dalam menegakkan hukum secara adil harus menunjukkan sikap yang sama tanpa memandang rasa atau suku dan tidak diskriminatif terhadap warga negara dihadapan hukum.

Politik pada saat ini cenderung kepada nilai-nilai kemanusiaan, politik hanyalah bagian dari alat untuk memperkuat kekuasaan atau kepentingan pribadi. Mayoritas orang yang terlibat dalam dunia politik hanya untuk meraih nafsu kekuasaan yang ingin diraihnya dan mengenyampingkan nasib orang lain, hal ini merupakan menyimpang dari ajaran etika yang sesungguhnya. Maka dari itu politik dianggap buruk ditengah-tengah masyarakat, pada dasarnya politik merupakan wadah, yang membuat buruk ialah orang-orang yang di dalamnya, dalam kata lain orang yang terjun langsung kedalam dunia politik.

Oleh karena itu, apabila politik dan oknum yang terlibat itu bisa menjalankan tugas serta kebijakannya dengan baik yang berlandaskan kepada Al Quran dan Hadist, maka makmur lah sebuah negara tersebut. Mengapa para politikus atau pemimpin tidak memikirkankan dan mengedepankan nasib masyarakatnya yang benar-benar harus diberi uluran tangan serta keadilan yang semestinya didapat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Etika Politik Di zaman Kontemporer Menurut tokoh Muslim yakni Al Mawardi, dalam hal ini konsep etika yang dibahas tidak terlepas dari tuntunan Al Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini akan dikutip untuk dijadikan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep etika politik pandangan Al Mawardi
2. Apa landasan etika politik menurut Al Mawardi

3. Bagaimana penerapan etika politik menurut Al Mawardi di masa pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)

C. Batasan Istilah

Dari judul penelitian maka dalam penelitian ini diuraikan mengenai Batasan istilah yang tertera dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep merupakan gagasan atau maksud yang diabstrakkan dari kejadian nyata.⁹

2. Etika

Etika merupakan ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk, serta berbicara mengenai hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap patuh seseorang terhadap segala aturan sosial maupun kesusilaan. Etika banyak menjelaskan tentang prinsip tingkah laku manusia atau bersikap serta bertanggung jawab dengan berbagai aturan ajaran moral.

3. Politik

Politik memiliki bermacam makna yang sesuai dengan kegiatan suatu konsep Pemerintahan dan negara dan menyangkut dengan menentukan arah dan tujuan sistem dan diikuti oleh pelaksanaan tujuan tersebut. Politik menurut Aristoteles ialah mewujudkan kehidupan yang baik atau sejahtera secara bersama-sama bukan bersifat pribadi. Politik juga tidak terlepas yang namanya kekuasaan, jadi

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 120

kalau berbicara tentang politik pasti ada maksud dan tujuan di dalamnya melainkan kepentingan sekelompok orang.

Secara universal politik dapat disimpulkan adalah suatu bentuk usaha agar peraturan yang telah dibuat dapat diterima oleh seluruh rakyat di bangsa ini, agar terciptanya rakyat yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan pengertian politik secara sederhana dapat diartikan adalah cara, teknik atau strategi untuk mempengaruhi individu maupun orang banyak¹⁰

Politik adalah sebuah konsep untuk mengatur masyarakat, yaitu saling keterkaitan dalam masalah bagaimana pemerintah menjalankan demi terwujudnya hidup yang sejahtera.

Politik bertujuan agar sebuah kehidupan lebih membaik dalam bernegara. Maka, dirancanglah kebijakan atau sebuah strategi dalam melaksanakan aktivitas politik melalui kekuasaan yang dimiliki para penguasa.

4. Etika Politik

Etika politik merupakan sebuah jalan atau wadah yang sangat diharapkan dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam hubungan antar pelaku antar kekuasaan politik serta antar kelompok yang mempunyai unsur kepentingan dalam mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan golongan tertentu. Etika politik juga berupaya dalam menyadarkan sikap elite politik atau pejabat

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 13

publik untuk bersikap jujur, sportif, amanah, teladan, rendah hati dan memiliki jiwa ksatria untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat publik apabila telah berbuat salah atau kebijakan yang dibuat bertolak belakang dengan hukum.

Etika juga diwujudkan dalam bersikap yang memiliki tata karma dalam berperilaku politik yang lebih toleransi, tidak arogan, tidak melakukan kebohongan publik dan jauh dari sifat munafik. Etika harus dijadikan sebuah pedoman dalam berpolitik untuk mewujudkan politik yang sopan, pintar dan harus menempatkan urusan negara yang di atas daripada golongan dan kelompok.

5. Penerapan

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan suatu sikap yang menerapkan. Adapun pendapat beberapa ahli penerapan ialah perbuatan mempraktekan suatu konsep, metode dan suatu bentuk kepentingan atau ingin meraih tujuan yang diinginkan oleh kalangan atau kelompok yang sebelumnya sudah tersusun dan terkonsep.¹¹

6. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan cara dalam menjalankan mandatnya diberbagai sektor misalnya, Ekonomi, Politik, Administrasi, dan lain-lain dalam menjalankan urusan tentang Negara agar terciptanya hidup yang lebih sejahtera.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 153

7. Jokowi

Jokowi atau Joko Widodo merupakan Presiden ke Tujuh Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, yang pada saat itu wakilnya adalah Jusuf Kallah. Jokowi terpilih lagi untuk periode kedua pada tahun 2019 dan yang wakilnya adalah seorang ulama yaitu KH. Ma'ruf Amin.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana Konsep Etika Politik Dalam Penerapan Di Zaman Kontemporer Menurut tokoh Muslim yakni Al Mawardi, dalam hal ini konsep etika yang dibahas tidak terlepas dari tuntunan Al Qur'an dan Hadist.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memperoleh data yang *valid* dalam pokok dari pembahasan etika politik pemikiran dari Al Mawardi hingga dengan mudah menjawab permasalahan yang terkait di zaman sekarang.
- b. Memberikan sumbangsi ilmu sehingga dengan mudah memberikan berupa ide bagi intelektual Islam Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian agar berguna dalam acuan pustaka untuk peneliti berikutnya ketika ingin meneliti atau untuk mengetahui konsep pemikiran intelektual Islam.

- b. Untuk sumbangsi atau tambahan dalam membuka cakrawala pemikiran dalam mencukupi kajian yang ada terhadap pandangan Al Mawardi tentang etika politik.

F. Kajian Terdahulu

Adapun keterkaitannya dengan pembahasan etika politik sebagai berikut:

Buku tentang *Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, karya Prof. Dr. Abdul Muin Salim, adapun buku ini mengenai perbincangan Islam dan tentang Negara yang dikenal dengan tiga bentuk pemikiran. *Pertama*, kelompok yang mempunyai pendapat bahwa Islam bukan disemata-mata agama yang berarti hanya urusan manusia dan Tuhan, melainkan juga mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk urusan negara. *Kedua* golongan ini malah sebaliknya bahwa urusan negara tidak ada berkaitan dengan Islam. *Ketiga* golongan yang menyatakan Islam tidak terdapat sistem kenegaraan melainkan hanya berbicara terhadap prinsip nilai etika dalam bernegara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku atau jurnal saling berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Penelitian nya ialah mengkaji tokoh, maka mendapatkank metode yang sifatnya fundamental dalam mendapat pengetahuan mengenai tokoh tersebut yakni penelitian tentang biografi,

penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian menggunakan pendekatan normative adapun pengertian dari pendekatan normative adalah salah satu usaha untuk memberikan pemaparan hasil dari pemikiran atau pendapat dari tokoh yang diteliti

3. Sumber Data

Penelitian memiliki dua jenis sumber data yakni sumber data sekunder dan sumber data primer yang dilakukan oleh penulis. Sumber data primer merupakan karya dari tokoh yang diteliti, yaitu karya dari Al Mawardi yang terkenal ialah *Al ahkam al- shultaniyyah*, dan beberapa karya tulis yang lainnya.

Adapun sumber data sekunder merupakan kesamaan literatur yang dikutip dari buku-buku lain yang baik maupun di internet dan tulisan dari tokoh lain terdapat di dalamnya penjelasan tentang etika politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, *pertama*, topik yang diteliti dengan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku atau karya-karya yang bersangkutan. *Kedua*, menyelidiki hasil dari karya yang pernah membahas mengenai topik yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data atau metode menganalisis isi (content analysis) atau analisis dari segi interpretasi dan tesktual. Adapun metode ini adalah menyingkap hasil dari pemikiran yang tercermin dari situasi penulis. Metode interpretasi untuk mewujudkan capaian pengetahuan yang baik atau benar dan menyingkap tabir fakta yang terjadi, gejala situasi dan kondisi serta data yang valid.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang membahas masalah latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan dan metode penelitian

Bab II Secara garis besar terkait tentang pengertian Etika Politik, prinsip dasar Etika Politik Kontemporer, sejarah etika politik dan pengertian etika menurut para ahli

Bab III berfokus pada pembahasan Biografi dari Al Mawardi pemikiran politiknya yang meliputi riwayat hidup, pendidikan dan kepribadian, lingkungan sosial politik, karya-karya dan integritas Al Mawardi. Pemikiran politik Al Mawardi termasuk didalamnya yaitu: Teori Kontrak Sosial, Imamah dan Tentang Wazir

Bab IV Membahas tentang etika politik menurut Al Mawardi pada masa pemerintahan Jokowi (2019-sekarang)

Bab V penutup yang terdapat kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Etika Politik

Etika berawal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti kebiasaan atau adat, perilaku, perasaan, dan pandangan dalam berpikir. Etika adalah suatu disiplin ilmu tentang perilaku atau kebiasaan manusia. Baik dan buruknya perilaku manusia dapat tergambarkan dari kebiasaan atau adat disekitar tempat tinggalnya.

Etika dalam kata lain adalah *akhlak*, yang bermula dari bahasa Arab yakni *Khalaqah* dapat diartikan menciptakan. Akhlak tidak hanya serangkaian aturan atau mengatur sikap dalam hidup bersosial, namun juga menjaga hubungan baik manusia dengan sang pencipta dan alam semesta. Kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kesusilaan atau pekerti.

Etika, moral dan akhlak memiliki pengertian yang serupa yaitu menentukan baik dan buruknya sikap dan tingkah laku manusia. Tetapi Etika, Akhlak dan Moral juga mempunyai perbedaan yang fundamental, Etika selalu bergantung dari rasional manusia, Akhlak biasanya selalu berlandaskan dengan aturan dari tuhan dan nabi yakni Al Qur'an dan hadist, sedangkan Moral suatu kebiasaan universal yang sesuai adat masyarakat disekitar.¹²

Melihat perbedaan akhlak, etika dan moral dapat ditinjau dari baik dan buruk yang digunakan. Yang menjadi tolak ukur baik atau buruknya sifat dilihat dari Al

¹² Eka Zuliana, Tesis, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Majid*, 2015 hlm.56-58

Qur'an dan Sunnah, adapun moral dan etika berdasarkan dari kebiasaan bisa jadi kesepakatan yang dibentuk masyarakat. Seandainya suatu kelompok masyarakat menganggap perbuatan itu baik maka hal itu dapat dikatakan baik dihadapan mereka.

Adapun ayat yang sering kita dengar tentang etika atau akhlak ialah surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"¹³

13"

Secara bahasa, etika adalah sistem mengenai prinsip moralitas. Berbeda hal nya dengan etika, moral berattikan pada prinsip benar dan salah, baik dan buruk. Etika dapat diartikan sebuah filsafat atau berpikir kritis yang bersifat fundamental tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral.

Etika pandangan filsafat merupakan suatu disiplin ilmu untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk dengan melihat amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia.

Politik juga berawal bahasa Yunani Kuno, "*politikos*" ialah berarti milik negara. Politik juga dapat diartikan hubungan antar sesama manusia, dimana dalam hubungan tersebut terdapat muncul tata aturan dan kewenangan kekuasaan.

¹³ Q.S. Al-Ahzaab/33: 21

Menurut pandangan Ramlan Subakti ada lima mengenai politik.

Pertama, dilihat secara klasik bahwa politik ini adalah usaha yang diperoleh warga negara agar dibicarakan diwujudkan agar terciptanya kehidupan yang baik secara bersama-sama. *Kedua*, berdasarkan kelembagaan yang berarti politik merupakan hal-hal yang berhubungan dengan proses kegiatan negara dan pemerintahan.

Ketiga, disini politik merupakan kekuasaan yang berarti seluruh kegiatan yang dikomandokan untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan di masyarakat. *Keempat*, politik sebagai fungsionalisme, ialah politik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan rumusan dan melaksanakan kebijakan secara universal. *Kelima*, politik adalah persoalan, yaitu kegiatan untuk menghasut sebuah proses rumusan kebijakan umum agar bertahannya nilai-nilai.¹⁴

Adapun Miriam Budiardjo berpendapat pada dasarnya politik merupakan keanekaragaman aktivitas termasuk sistem politik yang di dalamnya menyangkut sebuah proses untuk menentukan tujuan dari sistem ini dan melaksanakan sebuah tujuan tersebut.¹⁵

Politik adalah fungsi budaya, hingga akhirnya merupakan fungsi agama. Politik dalam pandangan Islam, menurut Pulungan adalah kata politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu yang berawal dari kata *sasa* yang berarti mengurus, memerintah serta mengatur. *Siyasat* bisa juga diartikan pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.

¹⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 2

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm. 15

Jadi *siyasa* berdasarkan bahasa berartikan, mengatur, memerintah, mengurus, memimpin, politik dan pemerintahan. Dalam arti mengurus, membuat, dan mengatur kebijakan yang sifatnya politik agar meraih kekuasaan dan bertujuan adalah *siyasa*.

Berdasarkan historis filsuf dari Yunani Kuno yaitu Aristoteles pendapatnya “manusia adalah binatang politik” asumsi tersebut bermaksud, pada dasarnya seluruh aktivitas sosial yang dikerjakan adalah politik. Dikarenakan komunikasi yang dihadirkan antara satu dengan yang lain pasti ada politik terlibat didalamnya. Politik bisa juga diartikan sebagai alat pengaturan masyarakat agar terciptanya sebuah hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁶

Politik di era globalisasi saat ini telah banyak mengacuhkan nilai-nilai kemanusiaan, politik hanyalah alat untuk memperkuat kekuasaan atau kepentingan pribadi. Mayoritas orang yang terlibat dalam dunia politik hanya untuk meraih nafsu kekuasaan yang ingin diraihinya dan mengenyampingkan nasib orang lain, hal ini merupakan menyimpang dari ajaran etika yang sesungguhnya. Maka dari itu politik dianggap buruk ditengah-tengah masyarakat, pada dasarnya politik merupakan wadah yang membuat buruk ialah orang-orang yang di dalamnya dalam kata lain orang yang terjun langsung kedalam dunia politik.

Dari penjelasan Etika dan Politik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh yang bersangkutan pada akhlak agar jadi bahan rujukan memimpin, mengelolah dan mengatur agar terciptanya kemaslahatan bersama. Etika politik merupakan bahan

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm. 63-65

untuk dijadikan pedoman aturan dalam menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik hingga menjadi tolak ukur martabat manusia.

Etika politik merupakan hal yang terpenting di dalam ajaran Islam, pertama politik merupakan sebagian bentuk ibadah. Misal, politik harus niat lillahi taala. Berpolitik pada dasarnya tidak boleh melanggar ajaran-ajaran atau perintah agama.

Etika politik merupakan sebuah sarana mampu menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam hubungan antar pelaku antar kekuasaan politik serta antar kelompok yang mempunyai kepentingan dalam menciptakan kemajuan bangsa dan negara dengan mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan golongan tertentu. Etika politik juga berupaya menyadarkan sikap elite politik atau pejabat publik untuk bersikap jujur, sportif, amanah, teladan, rendah hati dan memiliki jiwa ksatria untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat publik apabila telah berbuat salah atau kebijakan yang dibuat bertolak belakang dengan hukum.

Etika juga diwujudkan dalam bersikap yang sopan dalam berperilaku politik agar lebih toleransi, tidak arogansi, tidak melakukan kebohongan publik dan jauh dari sifat munafik. Etika harus dijadikan sebuah pedoman dalam berpolitik untuk mewujudkan politik yang sopan, pandai dan harus menempatkan urusan negara yang di atas daripada golongan serta kelompok.

Franz berpendapat empat alasan etika jaman sekarang begitu jadi bahan perhatian. *Pertama*, hidup dari masyarakat yang kian pluralistik, termasuk dalam bidang moral. Dalam berkehidupan secara sosial setiap harinya manusia yang berjumpa, mereka memiliki agama, suku serta budaya yang berbeda hingga begitu banyak menyebabkan

pandangan moral yang mungkin bertentangan. Dan terkadang mereka mengira pemahaman mereka lah yang begitu tepat. *Kedua*, hidup manusia dimasa transformasi yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah terjangan kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda Indonesia diseluruh pelosok-pelosok terpencil sekalipun. Kepercayaan akan maju, rasionalisme, individualisme, sekularisme, serta pendidikan modern yang menjadi berubah sendi budaya dan rohani di Indonesia.

Ketiga, proses dalam perubahan dari sosial budaya dan moral oleh beberapa pihak. Mereka memberikan penawaran ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat. *Keempat*, etika juga sangat dibutuhkan oleh kaum agama disatu pihak untuk kemantapan dalam menemukan dasar mereka, disatu sisi berpartisipasi ketika kehidupan masyarakat yang telah berubah.

B. Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer

Ada lima prinsip dasar yang dapat menjadi tuntunan Etika Politik modern atau di zaman Kontemporer.

1. Pluralisme

Pluralisme dapat diartikan hidup dengan dengan damai, jauh dari sikap intoleran dan dapat menerima hidup dengan akur walaupun berbeda pandangan, agama, adat maupun suku. Prinsip pluralisme telah tertuangn di dalam Pancasila disila pertama yaitu Ketuhanan Yang Masa Esa bahwa bangsa Indonesia tidak

mengasingkan suatu kelompok atau etnis yang berbeda keyakinan. Ini membuktikan tingginya keberadaban karakter kolektif bangsa.¹⁷

Dalam situasi politik saat ini, pluralisme politik diaktualisasikan kepada lembaga Eksekutif dan Legislatif dimana sebuah wadah warga Negara dalam mewujudkan kepentingannya harus berpedoman pada Konstitusi Negara.

2. HAM

Isu-isu Hak Asasi Manusia adalah perbincangan para pemikir modern, menurut Miriam Budiarjo HAM merupakan hak manusia yang telah didapat dari lahir hingga ia hidup bersosial. Jhon Locke berpendapat bahwa hak tersebut merupakan sebuah kodrat yang langsung dari tuhan, hingga dapat disimpulkan tidak seorangpun yang dapat mencabut hak tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang telah dimiliki manusia sejak ia masih di dalam kandungan. Ini bersifat absolut supaya setiap manusia dapat berkembang sesuai yang diinginkannya. Sesuai isi undang-undang dasar dipasal 28C yang berbunyi: setiap orang mempunyai hak atas dirinya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni demi kemashlahatan manusia.¹⁸

Politik hukum dan HAM beartikan suatu kebijakan hukum tentang HAM yang mencakup dalam kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu dibuat, hal ini dibuat untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik agar

¹⁷ Jubair Situmorang, *Etika Politik...*, hlm. 54

¹⁸ Husnel Anwar Matondang, *Islam Kaffah*, (Medan: Perdana Publishing 2017), hlm. 178

terbebas dari pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri. Yang menjadi tugas besar bangsa Indonesia adalah bagaimana dapat menyelesaikan kasus atau pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta menyiapkan seluruh perangkat hukum agar lebih bergerak cepat dan responsif agar di masa mendatang pelanggaran HAM tidak terjadi lagi, terutama yang dilakukan oleh negara untuk dapat dihindari.

Orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran HAM juga telah jauh dari nilai-nilai etika, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Meskipun Indonesia menganut Negara hukum dan demokrasi serta memiliki konstitusi yang menyatakan keterpihakannya pada perlindungan HAM, namun Indonesia masih merai nilai tinggi dalam pelanggaran HAM diantaranya yang dilakukan oleh aparat secara massif.¹⁹

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas mempunyai makna yaitu bahwa manusia tidak dapat memikirkan diri sendiri tetapi harus memikirkan orang lain. Karna pada dasarnya manusia juga harus berkontribusi untuk orang lain. Cakupan dari Solidaritas Bangsa ialah keluarga, kelompok-kelompok tertentu serta bangsa.

Solidaritas juga dapat diartikan secara bahasa yaitu kebersamaan, tenggang rasa, tenggang hati dan kekompakan. Durkheim memberi dua tipe solidaritas yakni solidaritas organis dan mekanis. Masyarakat tergabung dalam solidaritas mekanis ialah bersatu padu karena semua orang adalah generalisasi, masyarakat

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Jurnal Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Hal: 1-3

berpandangan mereka yang memiliki kegiatan yang sama dan pekerjaan yang sama mempunyai rasa tanggung dan jawab yang sama pula. Sebaliknya, ikatan yang terlibat dalam masyarakat solidaritas organis ini ialah bertahan karena didalamnya tidak terdapat persamaan, realitas menunjukkan bahwa setiap orang memiliki perbedaan rasa tanggung jawab.

4. Demokrasi

Secara etimologis Demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni “demos” berarti rakyat dan “kratos” kekuasaan atau pemerintahan. Jadi Demokrasi berarti pemerintahan di tangan rakyat. Dulu konsep dari demokrasi diimplementasikan hanya diwilayah kecil hingga tersebar di pelosok dunia.

Demokrasi bisa diartikan kekuasaan di tangan rakyat, rakyat bebas memberikan aspirasi tetapi tidak keluar dari jalurnya. Demokrasi juga menyatakan tidak ada yang berhak dari sekelompok memberikan ancaman keselamatan orang lain.²⁰ Demokrasi juga berarti pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal inilah yang kita pahami tentang demokrasi yang begitu sederhana.

Saat ini demokrasi tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan, rakyat diberi hak untuk ikut andil dalam sistem demokrasi negara ini. Contoh sederhana ialah kita mempunyai hak suara dalam memilih pemimpin. Demokrasi dalam arti luas ialah rakyat diberi kesempatan dalam mengambil keputusan, di mana sangat dapat memberikan kehidupan baik untuk seluruh rakyat di bangsa ini.

²⁰ Jubair Situmorang, *Etika Politik...*, hlm. 55

Demokrasi pada hakikat yang tertinggi adalah terciptanya pluralisme politik yang dapat memberikan sebuah jaminan negara untuk tidak bersikap totaliter seperti terjadi di masa Orde Baru bilamana kekuasaan hanya berlaku pada pemerintah pusat dan dikendalikan oleh sekelompok orang saja. Reformasi menjawab tantangan tersebut karena secara prinsip pluralisme politik sering diwacanakan masih dalam tataran sikap dan sebuah konsepsi ideologis serta begitu sangat jauh dari tataran praktis sehingga nilai-nilai yang tumbuh dari demokrasi pancasila pasca reformasi dinilai menemukan relevansinya

5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan suatu bentuk yang terpenting dalam menggapai arah dalam bersosial. Kerapkali persoalan yang selalu kita hadapi saat ini ialah ketimpangan sosial atau kecemburuan sosial berawal dari ketidakadilan, dalam hal ini dapat terjadinya perpecahan antar kalangan terkhusus dalam permasalahan ekonomi.

Kata adil dalam KBBI diartikan, tidak memihak, sama berat dan berpegang teguh pada yang benar. Dalam Islam adil dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Azas keadilan ini begitu penting dalam politik, terutama untuk pemimpin yang membuat kebijakan dan tidak ada sikap mengetepikan satu kelompok.²¹

Pancasila merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu ingin terciptanya rakyat yang sejahtera, makmur dan maju. Al Qur'an dan Pancasila

²¹ Husnel Anwar Matondang. *Islam Kaffah...*, hlm. 5

sebagai bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memicuh semangat masyarakat Indonesia. Sebagai seorang Muslim yang bertempat tinggal di Indonesia, Al-Qur'an dan Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena ia adalah landasan untuk memuwujudkan cita-cita yaitu kehidupan baik secara bersama-sama atau untuk mencapai kehidupan yang harmonis serta sejahtera.

Hakikatnya setiap orang mau diperbuat harus adil, baik dari segi hukum, politik, ekonomi ataupun hidup dalam bermasyarakat. Di Indonesia, jika dilihat kebelakang tentang sikap tidak adil ini yang kerap kali menjadi penyebab pertikaian-pertikaian dalam masyarakat di Indonesia.

Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Al Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ٱعْدَلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." ²²

22

Dalam hal ini Al-Qura'an mengatakan bahwa Allah perintahkan orang mukmin agar benar-benar menegakkan suatu keadilan. Perintah ini diulang pada ayat lain yang berkaitan dengan perintah melaksanakan amanat kepada yang berhak menerimanya, karena ini juga merupakan bagian dari usaha menegakkan keadilan.

C. Sejarah Etika Politik

Sejarah dari etika politik telah ada sejak lama, jadi pemikir politik di periode klasik menjawab tentang struktur organisasi yang paling baik. Menurut pendapat Plato, negara baik adalah merupakan yang mampu mewujudkan suatu konsep keadilan yang dikemas sejalan dan selaras pada pemimpin agar tujuannya pada *idea* metafisik kebaikan. Plato berkeyakinan etika politik seperti itu paling efisien untuk

²² Q.S Al Maidah/5:8

memenuhi kecukupan semua rakyat, namun demikian dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Menurut Aritoteles, bahwa pendekatan etis yang diterapkannya merupakan kebahagiaan.²³

Bagi Aristoteles adanya sebuah negara, masyarakat hidupnya lebih sejahtera, jadi sikap atau perbuatan manusia harus lebih mengutamakan sikap etis. Negara baik merupakan negara mampu organisasinya tepat dan tugasnya serta pemimpin pengalaman.

Pada periode klasik, para filsuf belum mengetahui tentang legitimasi kekuasaan. Pada waktu itu etika politik belum merefleksikan nilai transendental dan belum paham arti kesejahteraan. Pada masa ini legitimasi etis menjadi tersorot pada etika politik. Legitimasi ada pada Negara itulah pendapat dari Augustinus, hingga dapat perbedaan yakni negara Allah dan negara duniawi. Negara Allah pada nantinya memperoleh pada kesempurnaan akhir zaman, adapun suatu saat negara hancur ketika datangnya akhir zaman. Dalam hal tersebut Augustinus belum menjelaskan etika politik berdasarkan teoritis.

Muncullah perkembangan selanjutnya yaitu Thomas Aquinas. Dia lebih memfokuskan pada bidang politik dan negara saja, terkhusus pada kaitanhukum kodrat dan negara. Pendapatnya hukum moral lebih menggambarkan kebijaksanaan ilahia. Dalam pendekatan ini sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba pada

²³ Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 36

tuhannya. Subtansi dari pandangan Thomas Aquinas ini adalah bahwa keberadaan negara adalah berdasarkan kodrat seorang manusia.²⁴

Berikutnya berkembangannya dalam kajian etika politik lebih sistematis. Di abad ke-17 muncul tokoh-tokoh filsafat yang mengembangkan pokok-pokok etika politik. Konsep John Locke tentang "memisahkan kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara", "kebebasan berpikir dan bernegara", "pembagian kekuasaan", dan konsep "hak asasi manusia". Dan selain itu ada tokoh lain dengan minat mengkaji etika politik, yakni Montesqueie dengan pendapat "pembagian kekuasaan", Rousseau dengan pemikiran "kedaulatan rakyat". Khan dengan gagasan tentang "Negara hukum demokrasi/*republican*".

D. Etika Politik Menurut Para Ahli

Etika politik dapat diartikan standart moral dengan disahkan nilai kemanusiaan hingga dapat menjadi bahan pertimbangan teoritik dalam persoalan dan memperjelas budaya politik atau legitimasi dari politik itu sendiri, tidak hanya itu tetapi sebagai bahan dalam bertanggung jawaban sebagai seorang manusia dalam tugasnya sebagai warna negara.

Menurut pendapat Muhammad Nasaruddin, etika politik merupakan salah satu bentuk dalam memperluaskan gerak dan kebebasan serta menghadirkan institusi berkeadilan. Defenisi di atas bertujuan pada poin sebagai berikut. "*Pertama*, lingkup kebebasan dimaksudkan adalah sosial-politik, artinya sosial dan politik begitu sangat

²⁴ Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika...*, hlm. 87

perlu dalam pelaksanaan kongkret kebebasan, termasuk termasuk jaminan hak. Termasuk di dalamnya kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan menyampaikan aspirasi dan sebagainya. *Kedua*, membangun sebuah institusi secara adil karena bisa terlepas dari lapisan masyarakat.”

Etika Politik pandangan Paul Ricoeur memuat tiga tuntutan. “*Pertama*, mendapatkan hidup secara baik kolektif maupun terhadap orang lain. *Kedua*, memperluas hidup secara kebebasan. *Ketiga*, membangun institusi secara adil. Etika politik bertujuan agar mendapatkan hidup layak, bersama maupun untuk orang lain.”

Pandangan dari Amien Rais, politik adalah aktivitas penting, bahwa masyarakat agar hidup lebih teratur apabila tinggal di negara dan perangkat kekuasaannya. Begitu penting peran dari politik dalam masyarakat modern, bahkan ada yang berpendapat politik merupakan sebuah panglima. Artinya sangat memberikan peran penting dalam menentukan corak sosial, hukum, budaya maupun dari berbagai aspek lainnya.”

Quraish Shihab berpendapat, siapapun yang berkuasa harus mampu menyelesaikan masalah umat, jadi setiap proses politik harus didasarkan terhadap nilai dan bersumber pada pengejaran agama. Itu merupakan bentuk pesan dari Rasulullah, bahwa ia hakikatnya Nabi Muhammad diutus Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Di sini Quraish Shihab sangat tidak setuju kalau politik menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan agar tercapainya tujuan. Orang yang berpandangan bahwa politik bersifat kotor, jangan pernah bawa moralitas dalam area politik dengan

mengatakan tidak ada lawan dan kawan yang abadi tetapi hanyalah kepentingan di atas segalanya, jargon seperti itulah hingga pada akhirnya orang anti dengan politik bahkan dapat menyesatkan masyarakat awam melihat kelakuan dari oknum politik haus dengan kekuasaan. Setiap orang boleh bercita-cita untuk meraih sebuah kekuasaan bahkan tinggi sekalipun, tetapi di dalam itu semua agar menjahui sikap yang tercela dan mencedrai konsep politik serta tidak melupakan nilai etika dan moral.”

Menurut Aristoteles, etika dan politik saling melengkapi, etika memulai dahulu. Kebahagiaan tergantung pada beberapa faktor eksternal (termasuk kesehatan dan sejumlah standart minimum hidup) dan pada kebiasaan-kebiasaan internal atau nilai-nilai luhur.

BAB III

BIOGRAFI AL MAWARDI DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

A. Riwayat Hidup Al Mawardi

Dikenal dengan nama Al Mawardi, ternyata nama lengkapnya adalah Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al Bashrah lahir pada tahun 364H dan wafat ditahun 450H atau dalam hitungan Masehi yaitu 974-1058M, beliau lahir di Basrah, Irak. Al Mawardi besar dari keluarga memiliki perhatian begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Asal kata Mawardi yaitu kata *ma'* (air) dan *ward* (mawardi) disebabkan beliau seorang anak dari penjual air mawar. Al Mawardi memiliki kecerdasan yang luar biasa yaitu kepandaian nya memberi argument, berdebat, berorasi dan tajam dalam menganalisis suatu hal maka dari itu disematkanlah dengan nama Al Mawardi.²⁵ Al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Dari kecil hingga menjadi dewasa beliau menghabiskan waktunya di Baghdad. Al Mawardi hidup dimasa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422H) dan al-Qaimu Billah (422 H – 467 H).²⁶

Wafatnya Al Mawardi pada tanggal 30 Rabi'ul Awal tahun 450 hijrah bertepatan 27 Mei 1058M. Kala itu Al Mawardi berusia 86 tahun. Pada saat itu banyak dari kalangan ulama dan para pembesar turut hadir di pemakaman beliau. Jenazah Al

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58

²⁶Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 9

Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.

Semasa hidup beliau ditandai dengan kondisi dan suasana pemisahan atau disintegrasi politik pada pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Kala itu pemerintahan Bani Abbas tidak mampu lagi untuk meraih keinginan dari daerah yang ingin mengkehendaki memisahkan diri dari Bani Abbas untuk membuat atau membentuk otonom baru. Pada akhirnya bermunculan dinasti baru yang tidak mau mengikuti perintah dari kekuasaan Bani Abbas.²⁷

Keberadaan khalifah Bani Abbasiyah mengalami kelemahan, dengan ambisi politik yang besar dan persaingan antara penguasa tinggi negara dan panglima militer Bani Abbas. Pada akhirnya pemimpin kala itu tidak memiliki kuasa dalam membuat kebijakan untuk Negara, ketika itu yang berkuasa ialah menteri dari Bani Abbas bukan berasal garis keturunan orang-orang Arab, tetapi dari keturunan Turki dan Persia.

Al Mawardi adalah sosok seorang pemikir Islam yang berjaya kala itu, yakni pada masa ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kesuksesan. Selain itu beliau dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan memiliki pengaruh besar pada Dinasti Abbasiyah. Al Mawardi dikenal seorang penulis yang produktif dan tidak hanya itu beliau juga seorang pemikir Islam

²⁷ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2010), hlm. 16

ahli fiqih, seorang politikus, sastrawan dan juga tokoh terkemuka pada masanya.²⁸ Meskipun beliau sosok seorang terkenal di Baghdad, namun sumber sejarah tidak banyak menganalisis tentang kehidupan keluarganya di Bashrah dan Baghdad. Pada masa pemerintahan Abbasiyah Al-Qadir Billaah setelah memberikan ringkasan kitab fiqh Syafi'i al-Iqna.²⁹

B. Riwayat Pendidikan dan Kepribadian Al-Mawardi

Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan, pendidikan dan peradaban pada masa itu, hal ini yang membuat Al Mawardi banyak menghabiskan waktu di Baghdad untuk menggali ilmu. Beliau pertama kali belajar agama terkhusus ilmu hadist ketika masih anak-anak dan bersama dengan temannya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari.

Sebelumnya Al Mawardi pernah menempuh pendidikan di Bashrah yang mana merupakan tempat kelahirannya. Di Bashrah beliau pernah belajar hadist dari beberapa ulama terkenal seperti Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn 'Adiy Ibnu Zuhar Al-Zuhar Al-Marzy,

Setelah melakukan pendidikan tersebut, kemudian beliau pindah ke Baghdad dan tinggal di Darb Az-Za'farani. Dari tempat itulah Al-Mawardi mulai mendalami ilmu hadist dan fiqh serta bergabung dengan halaqah Abu Hamid Al Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Setelah beliau menamatkan studinya di Baghdad, ia pindah

²⁸ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 43

²⁹ Al Mawardi, *Adab Ad Dunya Wa Ad Din...*, hlm. 9

ketempat kekota lain dalam menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Lalu, beliau pulang kembali ke Bashrah setelah berkeliling kota dalam menyebarkan ilmunya tersebut. Di kota itu ia mengajarkan hadist, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, dalam hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi merupakan seorang yang alim dalam bidang fiqh, hadist, adab (sastra), nahwu, filsafat politik, ilmu-ilmu sosial dan akhlak.

Sejarah mencatat, beliau pernah mempelajari bidang fiqh pada syekh Abu Al Hamid Al Asfarayini, sehingga ia dikatakan salah seorang ahli fiqh terkemuka dari madzhab Syafi'i.³⁰ Pada dasarnya Al Mawardi tergolong sebagai penganut madzhab Syafi'i, namun dalam bidang teologi ia juga memiliki pemikiran yang bersifat logika, dalam hal ini bisa dilihat dari penjelasan Ibn Sholah yang menjelaskan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan antara sunnah dan mu'tazilah, Al Mawardi ternyata lebih cenderung kepada mu'tazilah. Terlepas dari hal itu semua, Al Mawardi dikenal sebagai sosok seorang yang berwibawa, memiliki akhlak yang mulia, murah hati. Dalam hal ini sahabat Al Mawardi mengakui belum pernah melihat keluar dari sifat tersebut.

Al Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, kebanyakan guru Al Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah:

³⁰ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer...*, hlm. 17

1. Ash-Shumairi
2. Al Manqiri
3. Al Jabali
4. Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi
5. Ali Abu al-Asfarayini
6. Al Baqi
7. Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq

Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Asfarayini merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Al Mawardi. Dari Abu Hamid lah Mawardi mendalami Madzhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah Masjid Abdullah ibnu al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i. Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlaknya, membuat Al Mawardi terkenal sebagai seorang panutan yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat umum maupun pemerintah pada masa itu.

Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, diantara murid-murid Imam Al Mawardi:

1. Ahmad bin Ali bin Sabit bin Mahdi Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib
2. Abu Bakar Al Khatib
3. Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal Al Hamazi Al Faradi
4. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan
5. Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abu Uthman

6. Mahdi bin Ali Al-Isfarayni al-Qadi Abu Abdullah
7. Ibn Khairun
8. Abdul Rahman bin Abdul Karim
9. Abdul Wahid bin Abdul Karim
10. Abdul Ghani bin Nazli bin Yahya bin Hasan bin Yahya

Selain dari itu bahwa Al Mawardi dikenal sebagai sosok yang sabar, murah hati, berwibawa dan akhlak mulia. Hal ini diantara lain diakui oleh parah sahabat dan rekan yang belum pernah melihat Al Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.

C. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Al Mawardi

Sebagai mana telah disinggung secara singkat pada pembahasan sebelumnya bahwa Al Mawardi hidup pada masa kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, secara pasti Al Mawardi hidup pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Ketika itu keadaan dari sosial politik pada masa Al Mawardi adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di Baghdad sedang mengalami kemerosotan yang akibat melemahnya sistem pemerintahan hingga akhirnya jatuh daulah Abbasiyah pada tahun 656H.

Pada dasarnya Baghdad adalah pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah Baghdad adalah otak dari peradaban itu, dan sekaligus jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan

tetapi lambat laun “*cahaya gemerlapan*” itu pindah dari Kota Baghdad kekota-kota lain.

Al Mawardi lahir ketika pemerintahan Abbasiyah menghadapi krisis tersebut. Dalam hal ini krisis tersebut terjadi dan terbentuk berupa disintegrasi sosial politik yang semakin lama semakin parah. Faktornya adalah banyak dinasti baru yang lahir dan keluar dari kekuasaan Abbasiyah dan membangun kerajaan-kerajaan kecil di luar wilayah Abbasiyah.

Dalam hal ini, ketika dinasti ini mengalami kemunduran dalam hal politik, serta dibidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan juga banyak melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al Farabi, Al Mawardi, Al Ghazali dan lain sebagainya. Pada dasarnya pemimpin-pemimpin politik tersebut mempunyai perhatian yang besar pada semangat keilmuan. Selain itu pada saat itu juga berkembang mainstream bahwa kekuatan kejayaan suatu bangsa ada pada kekuatan ilmu pengetahuan, sehingga para pembesar dan para penguasa politik tersebut untuk mencurahkan segenap tenaganya pada bidang ini.

Pengaruh dari ajaran keagamaan mu'tazilah yang cenderung mengandalkan logika serta berkembangnya paham syi'ah yang dianut oleh pembesar Abbasiyah dari kalangan Bani Buwaih turut mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat terjadi di Baghdad tidak mempengaruhi kegiatan kajian keilmuan. “Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu dimana masa ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya.

Telah mengondisikan jiwa Al-Mawardi sebagai seorang yang punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil menghantarkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. Keadaan demikian ini tidaklah mengherankan jika Al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir Islam yang ahli dalam bidang fiqh dan sastrawan disamping juga sebagai politikus yang piawai.”

Keadaan politik dunia Islam pada masa Al-Mawardi yakni sejak akhir abad sebelas. Mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dari masa sebelumnya.³¹ Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain.

Keadaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada seorang kepala negara. Ketika itu kekuasaan khalifah di Baghdad bersifat formal saja. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintahan sebenarnya adalah para panglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki dan Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Orang-orang menuntut yang mengisi kekuasaan harus diisi bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy sebagai salah

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 58

satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.

Dengan situasi kekacauan seperti ini, pada tahun 429 H khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat Madzhab fiqih untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi dipilih untuk mewakili Madzhab Syafi'i dan menulis kitab al-Iqna. Al-Quduri mewakili untuk Madzhab Hanafi dan menulis kitab al-Mukhtasyar, sedangkan kedua kitab lainnya tidak begitu penting dan Al-Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karyanya yang terbaik. Untuk menghargai jasanya itu, Al-Mawardi diangkat sebagai *Aqdi al-Quddah* (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah.

Pelantikan ini menuai kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-Thabari dan al-Sinsari yang menyatakan bahwa tidak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Al-Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai *Aqdi al-Quddah* dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar *al-Muluk al-A'zam* (Raja Agung) bagi Jalal al-Daulah, seorang pemimpin bagi kaum Buwaiyah, meskipun Al-Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut.

Meskipun beraliran Sunni yang bermadzhab Syafi'i, Al-Mawardi tetap disenangi, baik penguasa Bani Abbas yang Sunni maupun oleh penguasa Dinasti Buwaihi yang Syi'ah. Bani Buwaihi senang padanya karena Al-Mawardi juga seringkali menyelesaikan pertikaian antara mereka.³²

D. Karya-Karya Al Mawardi

Al Mawardi adalah seorang penulis yang begitu produktif, di dalam kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktivitasnya untuk berkarya. Bahkan di sela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing muridnya di samping menulis buku.

Bedasarkan sejarah, banyak buku karyanya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al Mawardi tercatat banyak menghasilkan karya tulisannya dengan ikhlas. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:

a. Ilmu Fiqih

1. Al-Hawi al-Kabir

Al-Hawi al-Kabir adalah kitab yang terkenal sebagai kitab fiqih paling lengkap dalam madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fiqih yang mencakup seluruh sendi.

³² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 201

2. Adab Al- Qadhi

Kitab ini belum pernah diterbitkan hingga kini masih tersimpan di perpustakaan Sulaimaniyyah di Istanbul Turki. Seperti terbaca namanya, buku ini membicarakan tata tertib penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim.

3. Al Iqna

Suatu kitab fiqh madzhab Syafi'i, Al Mawardi meringkasnya dari kitan Al Hawi Al Kabir yang ia tulis dalam empat puluh kitab kuno. Buku ini telah dicetak pada percetakan Daar Al Arabah di Kuwait tahun 1982. Buku ini terdiri dari hukum-hukum seputar masalah fiqh tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, hanya saja Al Mawardi seorang tsiqah dikalangan ahli fiqh.

4. Alam An-Nubuwah

Kitab ini membahas tanda-tanda kenabian yang mana hal ini adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam berakidah. Kitab tersebut terdiri dari dua bagian satu diantaranya adalah khusus membahas tentang tanda-tanda kenabian.

b. Dalam Ilmu Politik

1. Al-Ahkam al-Sulthaniyah

Kitab ini adalah salah satu kitab yang paling terkenal dan paling banyak tersebar luas. Kitab ini telah dicetak berulang kali. Al-Ahkam al-Sulthaniyah adalah kitab prestisius karya Al-Mawardi dalam bidang politik. Kitab ini berisi tentang persoalan politik dan tata negara dalam bingkai Islam, diantaranya tentang pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan pemimpin jihad dan lain-lain.

2. Nasihatu Al Muluk

Naskah asli tulisan tangan dari buku ini berada di Paris terdiri dari 63 halaman, yang ditulis ulang pada tahun 1007 H. buku ini di tahqiq oleh ustad Ridwan As Sayyid yang banyak mentahqiq buku-buku karya Al Mawardi.

3. Tashilu An Nadzari wa Ta'jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa Siyasatu Al Mailiki.

Kitab ini berisikan tentang etika dan strategi pemimpin. Kitab ini dicetak pada percetakan Dear Al Ushur Mesir pada tahun 1929 M.

c. Dalam Ilmu Tafsir

1. Tafsiru Al-Quran Al Karim
2. An Nukatu wa Al Uyunu
3. Al Amsalu Wa Al Hikamu

E. Pemikiran Etika Politik Al Mawardi

Memahami pemikiran politik Al Mawardi ia selalu melandasi dengan kaidah-kaidah keislaman, yang sesuai ilmu ditekuninya. Maksudnya, Al Mawardi selalu berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Al Mawardi juga sangat berjasa dalam merumuskan gagasannya hingga dapat menjadi bahan rujukan kita saat ini dalam berpolitik.

Ia tidak hanya menjadi seorang mujtahid, dengan kepintarannya ia juga berijtihad dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kerap kali ia memperoleh solusi baru yang dapat diterima akal sehat manusia saat ini, namun sering juga berbeda pandangan dengan pendapat orang-orang sebelumnya.

Salah satu pandangan yang mendasar dari Al Mawardi yaitu hubungan antara Politik dan Agama, selain itu Al Mawardi berpendapat terbentuknya sebuah negara, manusia sebagai makhluk sosial harus saling bekerjasama dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan dengan sendirinya tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Manusia hidup penuh keberagaman dan memiliki kemampuan serta saling bahu-membahu hingga sepakat untuk membangun sebuah negara.

Allah swt telah menerangkan di dalam Al Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai insan yang lemah, maka dengan kelemahan itu Allah menghendaki manusia untuk tidak bersikap angkuh, sombong serta egois.

Dalam pemikiran Al Mawardi, terbentuknya sebuah negara itu memiliki enam sendi utama. Pertama adalah Agama. Agama sangat berperan penting dalam kehidupan manusia bermasyarakat, agama mampu menaikkan semangat untuk membangun dalam melestarikan alam. Fungsi dari agama ialah mengontrol tingkah laku manusia serta hawa nafsunya, sehingga agama dapat menjadi dasar atau acuan dalam mensejahterahkan manusia.

Sendi kedua adalah Pemimpin Yang Berkharisma. Seorang pemimpin harus mampu menjadi tauladan bagi rakyatnya, maka kharismatik jadi bahan penting dalam pembentukan sebuah Negara. Pemimpin yang kharismatik mampu menghasilkan keadilan dan sejahtera, serta mampu melindungi setiap insan dan menjaga nama baik bangsa dan negara.

Sendi ketiga Keadilan Bersifat Universal. Salah satu syarat menciptakan negara yang damai dan rukun setiap warga negara, pemimpin harus mampu bersikap berkeadilan yang tidak membeda-bedakan suatu kalangan di masyarakat, hingga rakyat dapat menciptakan rasa menghormati terhadap pemimpin.

Sendi keempat Keamanan Yang Kuat. Dengan adanya keamanan yang kuat, dapat memberikan rasa aman bagi orang-orang yang lemah dan mampu mendongkrak jiwa yang kreatif dalam membangun bangsa. Ketika rakyat merasa aman, maka akan semakin taat terhadap seorang pemimpin.

Sendi kelima Kesuburan Tanah. Kebutuhan sandang dan pangan negara sangat bergantung pada tingkat kesuburan tanah, hal ini merupakan syarat kesejahteraan

rakyat sehingga dapat hidup yang layak dan tingkat konflik antar masyarakat berkurang.

Dan sendi yang terakhir keenam adalah Harapan. Generasi mendatang adalah pewaris dari generasi terdahulu. Harapan bagi generasi saat ini dan dan berikutnya begitu bergantung pada pengaturan negara dari sendi-sendi sebelumnya secara sistematis.

Dari keenam sendi di atas adalah pilar penyangga untuk hidup bersosial dan dapat menjadi landasan untuk membangkitkan suatu komunitas sosial. Dengan adanya itu, tinggal konflik antar kelompok sosial berkurang dan politik juga menjadi ancaman dari kelompok sosial yang lainnya.³³

Dari pernyataan di atas nampaklah kalau agama dan negara saling berhubungan timbal balik atau dalam kata lain saling membutuhkan, jadi agama membutuhkan negara hingga sebaliknya. Bersama negara, agama dapat dapat berkembang dan negara sangat membutuhkan agama agar nilai-nilai etika dan moral masih tetap tepatri di dalam negara tersebut.

1. Teori Kontrak Sosial

Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Al Mawardi juga memiliki pendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang saling bekerjasama dan menolong sesama, namun ia menempatkan paham agama di dalamnya.

Al Mawardi berpendapat manusia pada hakikatnya lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapat

³³ Rashda Diana DKK, *Jurnal Etika Politik Dalam Perspektif Al Mawardi...*, hlm. 370-373

keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, ini yang dapat menjadi dorongan manusia untuk bersatu dan saling membahu untuk membantu.

Berawal dari kebutuhan dan bekerjasama pada akhirnya untuk mendirikan sebuah negara, yang menjadi menarik adalah gagasan ketatanegaraan ini hubungan antara Ahl al-‘Aqdi wa al-Halli atau Ahl al-Ikhtiyar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh sebab itu, berhak untuk ditaati dan rakyat berhak dalam loyalitas mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Memberikan rasa keamanan kepada mereka dan mengola kepentingan mereka dengan baik.

2. Imamah

Pada bagian awal kitabnya Al Mawardi mengatakan bahwa imam dibentuk untuk mengganti posisi dari kenabian dalam urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurut Al Mawardi, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk menjaga keamanan negara dan mandate politik. Maka dari itu, seorang imam disatu sisi sebagai pemimpin agama dan disisi lain pula sebagai pemimpin politik. Menurut Al Mawardi, jabatan kepala negara dapat ditempuh melalui dua sistem, yang pertama adalah dipilih parlemen yang disebut ahl al-

hall wa al-aqd (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan).

Parlemen disyaratkan:

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al'Adalah) memenuhi semua kriteria.
- b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun syarat kepala Negara sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti luas
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
- c. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisan
- d. Sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk beraktifitas
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat
- f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi aggressor
- g. Berani dan tegas membela rakyat
- h. Keturunan etnis Quraisy

Al Mawardi menetapkan syarat terakhir berdasarkan hadist nabi yang mengutamakan suku Quraisy. Dalam dalam hal ini kalau melihat secara

kontekstual hak kepemimpinan bukanlah pada suku Quraisy saja, melainkan pada kewibawaan dan kemampuannya. Pada masa itu hanya suku Quraisy lah yang memenuhi syarat, apabila diluar dari suku Quraisy yang memenuhi syarat kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin maka layak untuk ditetapkan sebagai pemimpin termasuk kepala negara.

Kalau diperhatikan lebih dalam, syarat yang terakhir tersebut bisa jadi yang melatarbelakangi kondisi politik pada masa itu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya orang-orang Turki dan Persia ingin merebut kekuasaan orang Quraisy pada saat pemerintahan Abbasiyah dan Mawardi adalah elit politik dalam pemerintahan tersebut, sehingga status quo perlu dipertahankan agar terjamin stabilitas politik dan kekuasaan secara riil berada di tangan Abbasiyah.

Rakyat dapat meninggalkan kepatuhan atau bahkan memecat seorang imam jika terjadi indikasi berikut ini:

- a. Khalifah atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu dan melakukan kemungkaran.
- b. Khalifah atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik (missal, kehilangan akal, penglihatan, rasa, penciuman)
- c. Khalifah atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang membuat kemerdekaannya hilang.

3. Tentang wazir

Al Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk, pertama *wazir tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan

kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, *wazir tanfidz*, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tawfidh. Ia tidak berwenang menentukan menentukan kebijaksanaan sendiri.

Pada masa pemerintahan al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya.

Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umarah'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya.

Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *al-Aimmah min Quraisy* (kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak Syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau

mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.

BAB IV

**PENERAPAN ETIKA POLITIK AL MAWARDI PADA MASA
PEMERINTAHAN JOKOWI (2019-SEKARANG)**

A. Etika Politik Al Mawardi

Beban Etika Politik tidak hanya menggabungkan politik praktis, melainkan menopang agar persoalan ideologis yang bisa di jalankan secara benar. Etika politik yang dibahas oleh Al Mawardi begitu sempurna dalam membangkitkan kehidupan berpolitik.³⁴ Etika yang dijelaskan Al Mawardi begitu mengharuskan seorang kepala negara agar taat dan berpedoman kepada ajaran-ajaran yang telah tertuang di dalam Al-qur'an dan Hadist. Maka dari itu, Al Mawardi menuangkan pikirannya untuk memperbaiki keadaan rakyat dan menjaga keamanan dalam berpolitik.³⁵

Pada dasarnya Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, sumber dari inspirasi etika dan moral bangsa bernegara Islam lah yang menjadi landasannya. Adapun masalah yang dihadapi dalam perpolitikan bangsa Indonesia saat ini merupakan degradasi moral, begitu banyak kegiatan yang bisa kita lihat menyimpang dari ajaran agama yakni sogok-menyogok, korupsi dan hal buruk lainnya.

Al Mawardi adalah seorang tokoh pemikir politik Islam yang terkenal dan paling berpengaruh ketika pemerintahan Abbasiyah, hal yang paling mendasar dari pemikiran Al Mawardi ialah teori kontrak sosial yaitu manusia adalah makhluk sosial

³⁴ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah 2007)

³⁵Rashda Diana DKK, *jurnal etika politik dalam perspektif Al Mawardi...*, hlm. 364-365

yang sangat memerlukan orang lain agar tercapainya tujuan hidupnya untuk saling bekerja sama.

Al Mawardi berpendapat, manusia bersepakat dalam membentuk negara atas dasar kebutuhan. Selain itu teori kontrak sosial mengikat hak dan kewajiban dua bela pihak yaitu timbal balik antara kepala negara dan rakyat. Sebagai seorang kepala negara harus mempunyai kewajiban yang besar terhadap rakyatnya yaitu memberikan bentuk perlindungan, keamanan dan kenyamanan dalam berwarga negara dan dapat mengola hak-hak rakyat dengan baik serta bertanggung jawab. Namun sebaliknya sebagai seorang rakyat juga harus tunduk dan taat terhadap kepala negara.

B. Etika Politik Al Mawardi Dalam Relevansinya Di Masa Pemerintahan Jokowi (2019-Sekarang)

Mengkaji persoalan kehidupan dunia politik di Indonesia saat ini begitu kompleks. Hal ini menyebabkan Indonesia telah mengalami dan melewati berbagai masa yang begitu kelam di dalam dunia perpolitikan, diawali masa kemerdekaan yaitu masa orde lama hingga berlanjut ke masa orde baru sampai datangnya era reformasi tahun 1998 saat ini. Sistem politik di Indonesia kian berubah hingga masa transisi yang dahulunya sistem politik lebih mengarah ke otoritarian, namun sekarang sudah lebih beranjak ke arah yang kita kenal Demokrasi.³⁶

Indonesia mengedepankan nilai-nilai etika dan bentuk keadilan yang menyeluruh pada warga negara. Semestinya keadilan harus berpatok pada Pancasila dan UUD

³⁶ Jubair Situmorang, *Etika Politik...*, hlm. 49

1945 demi terciptanya rakyat berkeadilan serta makmur sebagaimana telah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.³⁷

Pada saat ini, etika dalam politik tidak terlalu dipikirkan oleh politikus bahkan terjadi yang namanya degradasi etika. Pada kenyataannya, politikus menampilkan diri secara terang-terangan yang haus segala kekuasaan, bahkan segala upaya dilakukan untuk mencapai yang diinginkan. Dalam hal ini, Nietzsche berpendapat makna etika di konstruksi dalam politik itu telah dihitungkan dari segi baik dan buruknya. Namun, praktisnya politik telah rusak akibat kelakuan politikus diantaranya kegiatan politik uang yang kerap kali diperbuat oleh oknum politikus di ajang kontestasi politik. Terlihat sikap politik yang dipertontonkan sekarang tidak lain sebagai ajang dalam kekuatan dan ingin meraih kekuasaan.

Perbuatan para petinggi politik tidak sama sekali melakukan tugasnya dalam mengedukasi rakyat. Hal ini menjadikan sikap yang buruk dalam berpolitik. Seandainya seperti ini terus diterapkan, maka hilangnya etika dalam politik. Seharusnya petinggi politik sebagai acuan yang efektif untuk rakyat dipimpinnya, yakni sikap dalam berpolitik harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa persamaan.

Dalam dunia politik, baik di kancah nasional maupun di tingkat daerah, begitu maraknya kegiatan tidak bermoral. Di tengah kehidupan elite politik terjadi pertarungan kepentingan antar pribadi dan kelompok yang kuat sehingga tidak lagi mengindahkan siapa kawan dan lawan termasuk saudaranya sendiri. Keadaan ini

³⁷ Jubair Situmorang, *Etika Politik...*, hlm. 50

diperparah oleh kasus yang bermunculan belakangan ini yang membawa para politikus elit kejeruji besi, hal ini menandakan kurang bermoralnya suatu bangsa. Begitu malangnya nasib bangsa ini akibat dari perilaku elit politik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kewibawaan.

Para petinggi politik kebanyakan tidak lagi berpihak kepada rakyat, melainkan kebanyakan dari mereka lebih mementingkan untuk urusan pribadi dan kelompok yang pada prinsipnya merugikan masyarakat pada keseluruhan. Bangsa ini lagi mengalami krisis kejujuran, krisis akan kesadaran kolektif untuk melakukan sebuah tindakan yang sifatnya destruktif hingga merugikan kepentingan bersama.

Di tangan sebagian elit politik, jabatan yang diemban menjelma menjadi sebagai sarana untuk berlomba-lomba pada jalan kejelekan (*fastabiqul sayyiah*) dan bukan pada jalan kebaikan (*fastabiqul khairat*). Para petinggi politik seolah-olah lupa bahwa bangsa ini memiliki falsafah negara, yakni Pancasila yang semua sila-silanya bersumber pada nilai-nilai agama. Hasilnya para elit politik atau para petinggi politik tidak terfikirkan lagi dalam mengimplementasikan nilai tersebut.³⁸

Dalam hal ini sikap dari elite politik di zaman pemerintahan Jokowi begitu sangat memprihatinkan, walaupun hanya sebagian elite yang jauh dari etika politik Al Mawardi tetapi rakyat seperti tidak percaya dengan janji para penguasa ketika melakukan kampanye, rakyat kerap kali diberi harapan yang tidak kunjung ditepati. Para elite politik tidak memenuhi tugasnya seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Maraknya praktik-praktik

³⁸ Abdul Salam Ahmad, Skripsi, *Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad sebagai acuan terhadap politik kontemporer...*, hlm. 3-4

Money Politik yang terjadi, dalam hal ini etika dari elite politik di masa sekarang sangat begitu jauh dari yang diharapkan.

Analisis mengenai pikiran dan etika politik dalam bahasan ini tidak semata-mata menjelaskan tentang persoalan sikap petinggi politik, namun melihat dari sisi sosial atau kemanusiaan dan kepentingan. Etika politik tidak memberikan penawaran suatu sistem aturan terhadap dasar negara. Etika politik disini tidak memberikan solusi untuk suatu permasalahan hanya saja memberikan aspek pikiran tentang menghadapi masalah kehidupan. Etika politik juga berperan sebagai alat mengkritisi ideologi (bukan hukum dan negara).

Landasan dari etika politik Al Mawardi adalah Al Qur'an dan Hadist, terbukti 6 sendi terbentuknya sebuah negara Al Mawardi menempatkan agama di urutan yang pertama, artinya segala sesuatu hal yang dikerjakan harus berlandaskan dengan nilai-nilai agama agar tidak terjadi yang namanya penyimpangan. Termasuk para elit politik yang memiliki kekuasaan harus melihat dari sisi agama apakah kebijakan yang diambil dapat merugikan rakyat atau tidak.

Esensi dari pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi rakyatnya hingga mereka dapat merasakan keadilan sosial sesuai dengan konsep etika kontemporer yaitu keadilan yang menyeluruh tanpa harus berpihak dengan satu golongan demi sebuah kepentingan sehingga rakyat yang dari segi ekonomi kelas bawah tidak diperdulikan. Dalam konstitusi rakyat mendapatkan perlakuan kesamaan tanpa memandang status ataupun jabatan seseorang.

Melihat peristiwa yang terjadi di Indonesia terkhusus pada masa pemerintahan Jokowi rakyat merasa dirinya tertindas dan pemerintah hanya berpihak pada golongan tertentu. Hal ini merupakan jauh dari sikap atau konsep etika politik Al Mawardi. Dalam Islam azas politik kenegaraan yang diajarkan Al Qur'an antara lain: Azas Amanah, Azas Ketaatan, Azas Keadilan, Azas Musyawarah, Azas Persamaan. Jika kita mencoba menganalisis dari azas yang diajarkan Al Qur'an dalam kaitannya pemerintahan Jokowi begitu sangat jauh yang diharapkan.

Pancasila merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu ingin terciptanya rakyat yang sejahtera, makmur dan maju. Al Qur'an dan Pancasila sebagai bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memicuh semangat masyarakat Indonesia. Sebagai seorang Muslim yang bertempat tinggal di Indonesia, Al-Qur'an dan Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena ia adalah landasan untuk memwujudkan cita-cita yaitu kehidupan baik secara bersama-sama atau untuk mencapai kehidupan yang harmonis serta sejahtera.

Pada prinsipnya semua manusia ingin diperlakukan secara adil, baik bidang hukum, politik, ekonomi maupun hidup dalam bermasyarakat. Di negara kita Indonesia, kalau melihat kebelakang persoalan ketidakadilan inilah yang seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat bangsa Indonesia.

Tujuan dalam bernegara sebenarnya adalah menegakkan keadilan sosial, karena dengan adanya keadilan sosial maka akan menumbuhkan rasa ikut rasa dan punya. Komitmen pada usaha untuk mewujudkan keadilan sosial, adalah dengan ketegasan

memperlihatkan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Dalam pelajaran pahit dari sejarah Indonesia yaitu melihat pengalaman yang buruk dalam bernegara yaitu diabaikannya dari nilai keadilan sosial, hingga muncul kegiatan ataupun praktek yang memunculkan unsur kezhaliman hingga merajalela dan bebas di Indonesia ini.

Etika banyak dilihat dan dinarasikan sebagai penengah, pengingat, penawar atau dapat dikatakan sosok yang bijak dalam ranah perdebatan, perilaku dalam ruang lingkup di masyarakat, pemerintahan baik berbangsa maupun bernegara. Etika dianggap sebagai pengawal ketika dua sisi argumentasi yang keras dan tidak berujung. Melihat fenomena yang terjadi sekarang begitu menarik untuk dibahas, ketika etika dihubungkan dengan politik yang ternyata ada dua sisi begitu bertolak belakang. Satu sisi menganggap etika politik begitu penting untuk menciptakan ruang demokratis yang baik sekaligus sebagai bahan acuan politik yang baik kepada masyarakat.

Namun, di satu sisi yang lainnya muncul ketidakcocokan nalar berpikir melihat penerapan etika politik sekarang ini seperti mahar politik, janji-janji ketika kampanye yang tidak terealisasi, saling menjatuhkan, saling fitnah dan saling melemparkan kabar Hoax. Dalam contoh kasus di atas begitu terlihat jelas ketika menjelang kontestasi politik di tahun 2019 dimana begitu bersejarah dalam Pemilu sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Di tengah-tengah masyarakat terjadi yang namanya pembelahan politik yang begitu besar hingga penyebabnya muncul kegaduhan antar tetangga demi membela pasangan calon Presiden. Dari sini kita dapat menganalisis

rakyat sudah mulai membuka diri yang awalnya tidak peduli dengan perkembangan politik di Indonesia.

Sebagai kaum yang berintelektual seharusnya elit politik dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan memberikan edukasi atau pendidikan khususnya politik agar tidak terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah sebagai penengah bukan berpihak disuatu kelompok atau tidak membuat isu demi kenyamanan berwarga negara dan tidak membuat polemik hingga hilangnya keakrapan sesama manusia.

C. Penerapan Etika Politik Di Indonesia

Hal yang terjadi saat ini dalam dunia politik Indonesia tidak seperti yang diharapkan, karena banyak rakyat berasumsi kalau politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya memikirkan kepentingan dan merebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia tidak mampu dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Terbukti sebagian masyarakat banyak yang mengeluh merasa tidak mendapat keadilan dan pemerintah hanya berpihak pada golongan tertentu dan rakyat juga merasa pemerintah belum dapat mensejahterakan hidup mereka.

Masyarakat beranggapan bahwa politik adalah buruk yang dikarenakan pemerintah Indonesia tidak begitu melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik, bagi mereka politik adalah sesuatu yang begitu buruk dalam meraih kepentingan atau kekuasaan.

Etika erat kaitannya dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar dan salah sebuah tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia yang tidak hanya sebagai seorang warga negara, serta hukum yang berlaku dan sebagainya.

Fungsi dari etika dalam masyarakat terbatas pada penyediaan teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak hanya berlandaskan emosi, prasangka dan apriori tetapi secara logika yang bersifat objektif dan argumentasi.

Adapun manfaat dari etika politik dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. *Pertama*, etika begitu penting dalam kaitannya dengan hubungan antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan maka etika sebagai prinsip normatif/etika normative sangat diperlukan. Etika disini merupakan sebuah keharusan ontologis. Dengan memahami konsep etika politik para pejabat tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya dalam menindas rakyat.

Kedua, tujuan dari etika politik adalah untuk memberdayakan mekanisme control masyarakat terhadap pengambilan keputusan atau sebuah kebijakan agar tidak menyalahi etika. Masyarakat harus ikut andil dalam mengurus negara dan tidak bisa melepaskan begitu saja. Masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan para pejabat, namun dalam tataran tertentu keduanya berbeda. Di dalam negara demokrasi masyarakat berperan penting untuk mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pejabat adalah representasi rakyat tentu harus dapat

mendengarkan kritikan tersebut sebelum sebuah kebijakan tersebut ditetapkan. Warga negara yang demokratis harus berusaha untuk menghentikan kebijakan pemerintah apabila kebijakan tersebut merugikan rakyat walaupun kebijakan itu dianggap benar oleh pemerintah. Mekanisme kontrol tersebut sangat penting agar para pejabat tidak mengambil kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.

Ketiga, para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun berjabat atau meninggalkan jabatannya. Para pejabat berkerja dalam lingkup organisasional, oleh sebab itu segala kebijakan yang diambil mesti berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dari bertanggung jawabnya sebagai seorang pribadi atas sebuah keputusan. Tanggung jawab pribadi tidak hanya berlaku saat ia memegang jabatan publik tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran etika politik Al Mawardi dan kontribusinya serta signifikansi pemikirannya dalam berpolitikan di Indonesia, yaitu tertuang dalam point-point berikut

1. Salah satu pandangan yang mendasar dari Al Mawardi yaitu hubungan antara Politik dan Agama, selain itu Al Mawardi berpendapat terbentuknya sebuah negara, manusia sebagai makhluk sosial harus saling bekerjasama dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan dengan sendirinya tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Manusia hidup penuh keberagaman dan memiliki kemampuan serta saling bahu-membahu hingga sepakat untuk membangun sebuah negara.
2. Dapat penulis simpulkan bahwa Etika yang dijelaskan Al Mawardi begitu mengharuskan seorang kepala negara agar taat dan berpedoman kepada ajaran-ajaran yang telah tertuang di dalam Al-qur'an dan Hadist. Maka dari itu, Al Mawardi menuangkan pikirannya untuk memperbaiki keadaan rakyat dan menjaga keamanan dalam berpolitik.
3. Dalam hal ini sikap dari elite politik di zaman pemerintahan Jokowi begitu sangat memprihatinkan, walaupun hanya sebagian elite yang jauh dari etika politik Al Mawardi tetapi rakyat seperti tidak percaya dengan janji para

penguasa ketika melakukan kampanye, rakyat kerap kali diberi harapan yang tidak kunjung ditepati. Para elite politik tidak memenuhi tugasnya seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Maraknya praktik-praktik *Money Politik* yang terjadi, dalam hal ini etika dari elite politik di masa sekarang sangat begitu jauh dari yang diharapkan.

B. Saran-saran

Pokok pembahasaan skripsi di atas dapat dilihat ada beberapa sisi pembahasan yang masih ada hal yang kurang mendalam pembahasan Al Mawardi dalam konsep etika politiknya.

Namun bila melihat seseorang intelektual Al Mawardi sebagai tokoh muslim yang cukup terkenal tidak terbatas hanya kepada pokok bahasan di atas, masih banyak lagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai upaya untuk lebih mengenal sosok Al Mawardi dan mengenali pemikirannya, baik dalam bidang politik maupun bidang-bidang keilmuan lainnya yang masih bisa diteliti lebih kompleks lagi.

Apabila dalam penelitian skripsi ini masih ada hal-hal yang masih kurang dari segi bahan dan sumber, kritik dan saran diharapkan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Sirajuddin, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: CV, Pustaka Tarbiyah, 2003
- Abdul Salam Ahmad, Skripsi, *Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad sebagai acuan terhadap politik kontemporer*, 2015
- Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Budiarjo Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 Balai Pustaka, Jakarta: Gramedia, 2002
- Diana Rashda DKK, *jurnal etika politik dalam perspektif Al Mawardi* <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsqafah>
- Iqbal Muhammad, Nasution Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Predana Group, 2010
- Handoyo Eko DKK, *Etika Politik* Semarang: Widya Karya Press 2016
- Matondang Husnel Anwar. *Islam Kaffah*, Medan, Perdana Publishing, 2017
- Mawardi Al, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2007
- Mawardi Al, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri Jakarta: Darul Falah, 2006
- Mawardi Al, *Adab Ad Dunya Wa Ad Din*.

Nata Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001

Situmorang Jubair, *Etika Politik*, Bandung, Pustaka Setia, 2016

Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990

Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999

Suseno Frans Magnis, *13 Model Pendekatan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1998

Q.S Al-Ahzaab/33: 21

Q.S Al-Maidah/5:8

Q.S. An Nisaa/4: 59

Zuliana Eka, Tesis, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Majid*, 2015